



DPMPTSP

Provinsi Kalimantan Barat

RENJA

RENCANA KERJA

TAHUN 2023



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Jl. Ahmad Sood No.1 Telp. (0561) 763690

Website: <https://dpm-ptsp.kalbarprov.go.id/>

Email: dpm-ptsp@kalbarprov.go.id

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
	1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	7
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	7
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	32
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	35
	2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	37
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	50
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	51
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	51
	3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	52
	3.3 Program dan Kegiatan	52
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	64
BAB V	PENUTUP	75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan rencana pembangunan yang mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik pemerintah maupun antar pemerintah daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasannya serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Perencanaan pembangunan juga dimaksudkan untuk menjamin penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat berubah nomenklatur menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Barat. Sebagai perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat menyusun Rencana Kerja yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Tahun 2023 dan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra). Dokumen Rencana Kerja yang disusun setiap tahunnya memuat rancangan program dan kegiatan DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat yang mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Barat dan Renstra DPMPTSP Provinsi Kalbar yang dalam pelaksanaannya perlu menetapkan program dan kegiatan yang terintegrasi dan terkoordinir pada masing-masing Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja ini memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya. Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat informasi rencana pembangunan yang akan dilaksanakan seperti program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, serta pembiayaan yang diperlukan yang selanjutnya menjadi acuan dalam penganggaran pembangunan yang disusun dalam Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4724);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal di Provinsi Kalimantan Barat;

9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Antar Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1);
11. Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 126);
12. Peraturan Gubernur Nomor 216 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 216).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 adalah untuk menjaga konsistensi antara kebijakan yang dilakukan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2023.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 adalah agar pelaksanaan Program/Kegiatan yang telah dibuat dapat dilaksanakan dengan baik sehingga pelaksanaannya dapat terarah, efektif, efisien tepat waktu, tepat sasaran dan tepat administrasi yang pada akhirnya akan mewujudkan sinergisitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.4. Sistematikan Penulisan

Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika minimal sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematikan Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
Memuat review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Menyajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Memuat tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan, tantangan dan peluang, dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis.
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Memuat perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini mengenai telaahan rumusan tujuan dalam Renja SKPD dan sasaran-sasaran berdasarkan rumusan tujuan tersebut berdasarkan isu-isu penting berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD.

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Memuat uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini memuat rencana program dan kegiatan berserta indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif dan sumber dana.

BAB V PENUTUP

Pada Bab ini berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 yaitu **meningkatkan laju pertumbuhan investasi** dengan sasaran strategis **meningkatkan nilai investasi** melalui promosi, kebijakan dan pengembangan serta pengendalian penanaman modal dan **meningkatkan kualitas pelayanan terpadu satu pintu** yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja DPMPTSP dan Pencapaian Renstra DPMPTSP s/d tahun 2022 disajikan pada tabel di bawah ini :

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase administrasi perkantoran yang menunjang urusan pemerintah daerah	100%		100%	92,72%	92,72%	100%	50,69%	50,69%
2.18.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan perencanaan kinerja dan keuangan tepat waktu	100%		100%	100%	100%	100%	66,31%	66,31%
2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi keuangan, dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang tepat waktu	100%		100%	100%	100%	100%	49,55%	49,55%

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Barat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.18.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%		100%	100%	100%	100%	44,63%	44,63%
2.18.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase meningkatnya disiplin aparatur	80%		80%	100%	125%	80%	25,07%	25,07%
2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan barang dan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dikelola dengan baik	100%		100%	100%	100%	100%	52,26%	52,26%
2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana tugas (komulatif tahun berjalan)	80%		80%	100%	125%	80%	80,93%	80,93%
2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%		100%	100%	100%	100%	49,16%	49,16%

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Barat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	80%		80%	80%	100%	80%	42,78%	42,78%
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase pemetaan potensi investasi berdasarkan komoditas di Kalimantan Barat	80%		80%	80%	100%	80%	65,12%	65,12%
2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Usaha Daerah, Penyusunan Kebijakan Penanaman Modal, Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal, Tersedianya Dokumen Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Data Potensi Investasi Regional (PIR)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen		

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Barat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Terlaksananya pemetaan potensi dan peluang investasi di Kabupaten/Kota Se Kalbar	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen		
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Sektor Ungulan Kalimantan Barat yang Dipromosikan	100%		100%	100%	100%	100%	31,97%	31,97%
2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Promosi investasi yang dilaksanakan	4 Dokumen		4 Dokumen	Refocusing	Refocusing	4 Dokumen	2 Dokumen	50%
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Kualitas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I dan Wilayah II	A		A	B	87,03%	A	A	90,19
		Persentase Izin dan Non Izin yang diproses sesuai SOP Wilayah I dan II	100%		100%	162,44%	162,44%	100%	46,59%	46,59%

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Barat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.18.04.1.01	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Mutu penyelenggaraan pelayanan perizinan			A	B	87,03%	A	A	90,19
		Jumlah izin dan non izin yang diterbitkan			1.350 izin dan non izin	2.193 izin dan non izin	162,44%	100%	46,59%	46,59%
2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Mutu penyelenggaraan pelayanan perizinan	A		A	B	87,03%	A	A	90,19
		Jumlah izin dan non izin yang diterbitkan	1.350 izin dan non izin		1.350 izin dan non izin	2.193 izin dan non izin	162,44%	100%	46,59%	46,59%
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Realisasi Investasi	100%		100%	87,31%	87,31%	100%	29,29%	29,29%
2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah laporan LKPM	2.400 LKPM		1.376 LKPM	5.130 LKPM	372,82%	1.514 LKPM	1.587 LKPM	104,82%
		Jumlah Perusahaan yang dipantau, dibina dan diawasi	20 Perusahaan		20 Perusahaan	24 Perusahaan	120%	25 Perusahaan	10 Perusahaan	40%

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Barat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.18.06.1	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Laporan Data Perizinan Berusaha dan Realisasi Investasi	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	2 Dokumen	50%
2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Rekonsiliasi Data dan Informasi PMA dan PMDN	4 Dokumen		4 Laporan	4 Laporan	100%	2 Kegiatan	1 Kegiatan	50%
		Jumlah Buku yang di cetak	2 buku		2 buku	2 buku	100%	2 buku	1 buku	50%

Alokasi anggaran murni tahun 2021 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Barat adalah sebesar Rp. 14.081.410.994 dengan pembagian Belanja Operasi (Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa) sebesar Rp. 13.533.431.394 dan Belanja Modal sebesar Rp. 547.979.600. Pada perubahan anggaran pertama tahun 2021, Belanja Operasi berkurang sebesar Rp. 621.298.868 sehingga menjadi Rp. 12.912.132.526, Belanja Modal berkurang sebesar Rp. 169.684.300 sehingga menjadi Rp. 378.295.300. Pada perubahan anggaran kedua, Belanja Operasi berkurang lagi sebesar Rp. 1.951.080.164 sehingga menjadi Rp. 10.961.052.362, Belanja Modal berkurang lagi sebesar Rp. 10.999.050 sehingga menjadi Rp. 367.296.250. Total anggaran tahun 2021 pada DPMPTSP Prov. Kalbar adalah sebesar Rp. 11.328.348.612.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021 dalam penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal sebagaimana teralokasi dalam APBD ada 2 sasaran strategis yaitu Meningkatnya Nilai Investasi dengan 4 program dan sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan 1 program. Alokasi anggaran DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 11.328.348.612 (sebelas milyar tiga ratus dua puluh delapan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu enam ratus dua belas rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 10.406.319.208 (sepuluh milyar empat ratus enam juta tiga ratus sembilan belas ribu dua ratus delapan rupiah) atau sebesar 91,86%.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang mendukung sasaran strategis DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Pagu anggaran Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebesar Rp. 191.610.680 dengan realisasi sebesar Rp. 191.489.050 dengan persentase 99,94%. Untuk mencapai sasaran pada Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dilaksanakan kegiatan - kegiatan sebagai berikut:

1.1. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp. 463.746.775 (empat ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah), setelah refocusing anggaran maka pagu anggaran menjadi sebesar Rp. 172.886.775 (seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terbagi ke dalam 2 (dua) Sub Kegiatan, yaitu :

1.1.1. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dengan anggaran setelah adanya Refocusing menjadi sebesar Rp. 389.695.754 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah), setelah refocusing anggaran maka pagu anggaran menjadi sebesar Rp. 144.303.754 (seratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah).

Adapun keluaran (indikator) dari sub kegiatan ini adalah :

- Terlaksananya Koordinasi Pemberdayaan Usaha Daerah target 1 dokumen .
- Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Penanaman Modal target 3 kegiatan.
- Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal target 3 kegiatan.
- Tersedianya Dokumen Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal target 1 dokumen.
- Tersedianya Peraturan Daerah Yang mendukung Penanaman Modal target 1 dokumen.

1.1.2. Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dengan anggaran sebesar Rp. 88.201.021 (delapan puluh delapan juta dua ratus satu ribu dua puluh satu rupiah) setelah adanya Refocusing anggaran menjadi sebesar Rp. 74.051.021 (tujuh puluh empat juta lima puluh satu ribu dua puluh satu rupiah), setelah refocusing anggaran menjadi sebesar Rp. 28.583.021 (dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu dua puluh satu rupiah).

Adapun keluaran (indikator) dari sub kegiatan ini adalah :

- Tersedianya Updating Data Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID) target 1 (satu) dokumen.

1.2. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi dengan 1 (satu) sub kegiatan yaitu Penyediaan Peta potensi dan Peluang Usaha Provinsi dengan anggaran sebesar Rp. 49.163.905 (empat puluh sembilan juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima rupiah), setelah refocusing anggaran menjadi sebesar Rp. 18.723.905 (delapan belas juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus lima rupiah).

Adapun keluaran (indikator) dari sub kegiatan ini adalah :

- Tersedianya Dokumen Pemetaan Potensi dan Peluang Investasi di PSN target 1 dokumen.

2. Program Promosi Penanaman Modal

Pagu anggaran Program Promosi Penanaman Modal yang sebelum terjadi perubahan adalah sebesar Rp. 337.805.118 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima ribu seratus delapan belas rupiah) guna melaksanakan 4 (empat) indikator kegiatan. Namun dengan adanya rasionalisasi terjadi perubahan anggaran menjadi sebesar Rp. 277.304.952 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus empat ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) atau berkurang sebanyak Rp. 88.268.316 (delapan puluh delapan juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus enam belas rupiah) atau sebesar 17,91%. Selanjutnya pada rasionalisasi lanjutan, anggaran berubah menjadi Rp. 151.688.492 (seratus lima puluh satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) atau berkurang sebanyak Rp. 125.616.460 (seratus dua puluh lima juta enam ratus enam belas ribu empat ratus enam puluh rupiah) atau sebesar 45,30%. Dari pagu anggaran Program Promosi Penanaman Modal sebesar Rp. 151.688.492, dana yang direalisasikan sebesar Rp. 151.633.800 dengan persentase 99,96%. Untuk mencapai sasaran pada Program Promosi Penanaman Modal dilaksanakan kegiatan - kegiatan sebagai berikut:

2.1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi terbagi menjadi 2 (dua) Sub Kegiatan, yaitu :

2.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi dengan anggaran sebelum terjadi perubahan sebesar Rp. 179.059.273 (seratus tujuh puluh sembilan juta lima puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), kemudian dengan adanya rasionalisasi dan perubahan anggaran menjadi Rp. 47.307.600 berkurang sebesar 73,57% dari pagu awal. Kegiatan ini merealisasikan anggaran sebesar Rp. 47.295.300 atau 99,97% dari pagu perubahan. Adapun sub kegiatan ini adalah Dokumen Penyusunan Strategi Promosi dengan pagu setelah perubahan sebesar Rp. 2.889.922 dari pagu awal Rp. 10.389.922 dan realisasi Rp. 2.889.922 atau telah melaksanakan sebanyak 100% dari pagu yang disediakan itupun hanya dapat dipergunakan untuk pengadaan barang pakai habis dan rapat internal, sehingga untuk target awal yang melibatkan sejumlah stakeholder dalam kegiatan promosi yaitu sebanyak 40 orang sekaligus nantinya diharapkan dapat menyusun dokumen bahan kebijakan marketing strategi dalam pelaksanaan promosi investasi tidak dapat terlaksana sedangkan untuk kegiatan Promosi Penanaman Modal ini

dilaksanakan oleh Seksi Promosi pada Bidang Promosi Penanaman Modal, dengan target melaksanakan event promosi sebanyak 4 kali kegiatan dengan pagu anggaran sebelum terjadi perubahan adalah sebesar Rp. 229.477.423 dan setelah rasionalisasi serta perubahan menjadi Rp. 44.405.378 dan telah direalisasikan sebesar 99,97% tetapi dengan pagu yang berkurang ditambah masih adanya Pandemi Covid 19 maka event Promosi yang direncanakan akan dilaksanakan 4 kali tidak dapat terlaksana sehingga outcome yang dicapai tidak maksimal.

2.1.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi dengan anggaran sebesar Rp. 158.745.845 setelah rasionalisasi dan perubahan anggaran pagu menjadi Rp. 104.380.892 dan realisasi Rp. 104.338.500 atau 99,96%. Sub kegiatan ini terdiri dari Penyiapan dan Penyusunan Bahan Promosi dan Investasi dengan pagu sebesar Rp. 98.572.526 realisasi Rp. 98.530.134 atau 99,97% untuk sub kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Media Promosi dengan pagu Rp. 5.808.366 terealisasi sebesar Rp. 5.808.366 atau 100%. Target dari kegiatan ini adalah memutakhirkan Media Promosi sebanyak 2 jenis yaitu dalam bentuk Website dan Kiosk yang *up to date* serta menyiapkan dan menyusun bahan untuk promosi sebanyak 3 jenis bahan yang nantinya akan diikuti pada setiap pameran. Hasil atau outcome yang diharapkan adalah peningkatan kemudahan dalam promosi dengan tersedianya bahan dan sarana promosi investasi.

3. Program Pelayanan Penanaman Modal

Pagu anggaran Program Pelayanan Penanaman Modal sebesar Rp. 583.403.850 dengan realisasi sebesar Rp. 579.160.500 dengan persentase 99,27%. Untuk mencapai sasaran pada Program Pelayanan Penanaman Modal dilaksanakan kegiatan - kegiatan sebagai berikut:

3.1. Kegiatan Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota

3.1.1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah memiliki alokasi anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp. 185.216.797 (seratus delapan puluh lima juta dua ratus enam belas ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dan setelah dilakukan perubahan pada Refocussing Covid-19 menjadi Rp. 64.875.766 (enam puluh empat juta

delapan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 64.797.900 (enam puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) atau 99,88%.

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah yang indikator keluaran sebagai berikut:

3.1.1.1. Jumlah Peserta Rapat Wilayah I dengan Target 50 Orang

Setelah dilakukan perubahan pada Refocussing Covid-19, keluaran sub Kegiatan menjadi Rapat-Rapat penanganan permasalahan perusahaan. Kegiatan ini dimaksudkan memfasilitasi penanganan berbagai permasalahan yang dapat menghambat perusahaan dalam melaksanakan penanaman modal di Provinsi Kalimantan Barat. Dengan Tujuan :

- Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait baik dari unsur regulator maupun pelaku usaha dalam rangka membahas isu-isu strategis dan actual dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan serta membahas permasalahan yang dialami dalam proses pelayanan perizinan;
- Memperoleh informasi masalah-masalah yang dihadapi perusahaan serta menyampaikan usulan dan saran sebagai bahan masukan dalam penyelesaiannya;
- Melakukan mediasi dalam rangka membantu dan memfasilitasi dalam penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi perusahaan dalam berusaha serta menanamkan modalnya di Provinsi Kalimantan Barat.

3.1.1.2. Jumlah Peserta Rapat Wilayah II dengan Target 50 Orang

Namun dengan adanya refofusing, maka kegiatan Rapat Koordinasi tersebut tidak dapat dilaksanakan. Kegiatan ini hanya dilaksanakan melalui pertemuan/rapat dengan jumlah peserta rapat yang terbatas di lingkungan kantor DPMPSTSP Prov Kalbar.

Adapun dalam pelaksanaan sub kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi:

- Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis terkait Penyusunan LKE PMPRB dan Pemenuhan Evidence, Rapat dipimpin dan dibuka oleh Kabid KP2NP Wil 2 dan di hadiri beberapa OPD Teknis yaitu Diskop UKM Prov Kalbar, RSUD dr. Sudarso, RSJ Prov Kalbar, Bapenda Prov Kalbar, Biro PBJ Setda Prov Kalbar, Biro Adpim Setda Prov Kalbar dan Biro Organisasi Setda Prov Kalbar, rapat dilanjutkan dengan penjelasan teknis mengenai pengisian lembar LKE PMPRB yang terdiri dari indicator Pemenuhan dan reform serta pengambilan keputusan persetujuan kepada 8 OPD

Prov Kalbar lainnya terhadap evidence yang akan diupload pada lembar LKE. Dan diberikan penjelasan tentang beberapa point yang menjadi tugas tim kelompok kerja bidang pelayanan public, evidence yang telah disetujui diserahkan ke Biro Organisasi untuk dikompilasi serta diupload untuk pemenuhan lembar LKE yang paling lambat harus segera di upload tanggal 11 Februari 2021.

- Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri rapat penyampaian Juknis Pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) dan mengikuti FGD dalam rangka monitoring terpadu dan evaluasi penerapan PP 18/2016 dan Permen Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah di Jakarta yang dilaksanakan pada tanggal 28 April s/d 1 Mei 2021. Kedudukan GWPP dibutuhkan untuk memperpendek rentang kendali pusat terhadap daerah, memiliki kewenangan mengkoordinasikan instansi vertikal di wilayahnya dalam rangka menciptakan keseimbangan hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam pemeliharaan Negara kesatuan agar tidak menimbulkan tumpang tindih urusan pemerintahan. Sedangkan pada kegiatan FGD, berkenaan template yang didesain kemendagri hendaknya ada keseragaman dalam struktur kelembagaan sehingga DPMPTSP seluruh Indonesia memiliki struktur yang sama dan sesuai dengan program dan kegiatan yang mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- Rapat membahas persiapan koordinasi ke Kementerian ESDM di Jakarta yang dihadiri oleh OPD ESDM, DLHK, Pihak Perusahaan dan DPMPTSP Prov Kalbar.
- Pelaksanaan Rapat Pertemuan dengan Komisi I DPRD Kab. Sekadau Rapat dipimpin dan dibuka oleh Kepala Dinas DPMPTSP Prov Kalbar dan di hadiri Pejabat DPMPTSP Prov Kalbar dan Dewan kab Sekadau beserta staf Setwan DPRD Kab. Sekadau.

Maksud dan tujuan kunjungan kerja yang dilakukan ke DPMPTSP Prov Kalbar adalah dalam rangka konsultasi dan koordinasi terkait Perizinan sawit mandiri, Sistem OSS dan perizinan lainnya yang berkaitan dengan Kabupaten Sanggau. Tanggapan dari DPMPTSP Prov Kalbar :

1. Loading ramp sawit tidak diatur perizinannya karena dilakukan perorang dan bersifat sementara, jika berkelanjutan dapat dibuatkan wadanya dalam bentuk koperasi supaya izinnya menjadi legal dengan syarat harus memiliki IMB, SPPL/UKL UPL/Izin Lingkungan selanjutnya koordinasikan dengan DPMPTSP setempat pada saat akan mendirikan koperasi agar KBLI yang dimasukan sesuai

dengan NIB yang nantinya diterbitkan dapat mengakomodir kegiatan usaha yang akan dilakukan.

2. Adanya Perubahan Sistem OSS versi 1.1 menjadi OSS RBA yang sudah bisa digunakan pada tanggal 4 Agustus 2021 namun ada masih ada kendala dan masih memerlukan penyempurnaan, koordinasi yang intensif dengan OPD Teknis.

Dari hasil pertemuan tersebut Dewan Kab. Sekadau dengan DPMPTSP Prov Kalbar selanjutnya akan Dewan Kab. Sekadau akan berkoordinasi dengan DPMPTSP Kab. Sekadau dan OPD Tehnis terkait agar dapat mencari solusi yang dihadapi di Kab. Sekadau terkait Perizinan, sehingga loading ramp sawit dapat diselesaikan dan tidak merugikan masyarakat.

- Menindaklanjuti hasil permintaan keterangan terkait permasalahan perizinan PT. Mendawa Argapura Sentosa, adapun hasil dari pertemuan tersebut yaitu :
 1. PT. MAS telah melakukan pengalihan saham dan pada saat berproses di Ombudsman RI perwakilan Kalbar legalitas tersebut yang digunakan perusahaan dan PT. MAS sudah memiliki NIB dengan nama Direktur dan susunan pemegang saham sesuai dengan akte yang dimiliki dan sudah memperoleh pengesahan dari Kemenkum Ham.
 2. Dasar penerbitan IUP OP adalah hasil rapat penanganan laporan dan laopran hasil akhir pemeriksaan Ombudsman, sesuai ketentuan pasal 38 ayat 1 UU no 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI dinyatakan bahwa terlapor dan atasan terlapor wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman.

3.1.1.3. Jumlah Pemenuhan Kepatuhan Pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Publik

Menurut Undang-Undang No 25 Tahun 2009, Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam melaksanakan pelayanan public pemerintah membentuk organisasi penyelenggara. Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata mata untuk kegiatan pelayanan publik. Penyelenggara dan seluruh bagian organisasi penyelenggara

bertanggung jawab atas ketidak mampuan, pelanggaran, dan kegagalan penyelenggaraan pelayanan.

Sebagaimana diamanatkan undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing dimana penyelenggaraan pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat setiap tahunnya selalu dimonitoring serta dievaluasi oleh Kemenpan RB. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 memberi mandate kepada Ombudsman RI untuk berperan sebagai lembaga pengawas eksternal pelayanan public baik yang dilakukan oleh pemerintah termasuk BUMN, BUMD dan BHMN serta badan swasta atau perorangan yang dananya berasal dari APBN atau APBD. Berdasarkan mandat, tugas, fungsi, dan wewenang Ombudsman RI bekerja terus-menerus mendorong pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, memperkuat dan membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah, serta pengawasan terhadap aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik yang diberikan sebagai hak yang harus dipenuhi kepada masyarakat. Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan tersebut setiap tahun Ombudsman Republik Indonesia melakukan penilaian dan pemeriksaan tingkat kepatuhan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terhadap standar pelayanan publik.

Berkenaan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk melaksanakan sub-kegiatan yang dapat meningkatkan persentase terhadap kepatuhan standar pelayanan publik agar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat tetap berada pada Zona Hijau dengan tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik Sangat Baik.

Kegiatan ini bertujuan Penilaian kepatuhan dimaksudkan untuk mendorong pemenuhan terhadap standar pelayanan public dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik.

Adapun ruang lingkup kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- a) Menyusun, menetapkan dan mempublikasikan standar pelayanan dan maklumat pelayanan.
- b) Menempatkan pelaksana yang kompeten.
- c) Menyediakan fasilitas pelayanan publik yang mendukung iklim pelayanan yang memadai.
- d) Memberikan pelayanan berkualitas sesuai asas penyelenggaraan pelayanan publik.
- e) Melaksanakan standar pelayanan.
- f) Mematuhi peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan pelayanan publik.

Adapun dalam pelaksanaan sub kegiatan yang telah dilaksanakan ada beberapa penilaian dari Kemenpan RB dan Ombudsman yang bertujuan untuk memberikan penilaian standar kepatuhan pelayanan publik di lingkungan kantor DPMPSTSP Prov Kalbar, diantaranya dengan diadakannya pertemuan sebagai berikut :

- Rapat pelaksanaan evaluasi penilaian pelayanan publik dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2021, rapat dipimpin oleh Kepala DPMPSTSP Prov Kalbar dan dihadiri pejabat Administrator, Pengawas dan Fungsional Umum, ada beberapa indikator yang harus diperbaiki yaitu Kebijakan pelayanan, profesional SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan dan Inovasi. Peserta rapat menyepakati memenuhi indikator tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pada tanggal 13 Agustus 2021 dan dikumpulkan pada tanggal 17 Agustus 2021.
- Rapat terkait Pengisian Form 01 Evaluasi Pelayanan Publik melalui Sistem Informasi Pelayanan Publik, pertemuan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021, rapat ini bertujuan untuk membahas kembali pengisian data untuk form 01 yang telah dilakukan pertemuan sebelumnya pada tanggal 29 Juli 2021, adapun beberapa hal yang dibahas yaitu pemenuhan terhadap mesin antrian yang belum tersedia, Penyusunan Standar Pelayanan melibatkan akademisi, Informasi Standar Pelayanan dapat diakses melalui tatap muka, telepon, email maupun website, Media Publikasi tersedia pada website dan leaflet, Terdapat 19 jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan yang disurvei yaitu sebanyak 19 jenis izin dan nonizin, jenis yang disurvei tersebut merupakan jenis izin yang sering diproses di DPMPSTSP Prov Kalbar, Data yang dipersiapkan merupakan data yang tersedia ada Tahun 2021, Izin pertambangan kewenangannya sudah diambil alih oleh pusat, Petugas pelayanan diusulkan untuk dilakukan bergiliran, Pemenuhan atribut petugas pelayanan seperti

identitas, 5S (senyum, salam, sapa, sopan, santun), Pin/logo sudah terpenuhi, hanya masih kurang seragam petugas pelayanan dan Area merokok disesuaikan dengan peraturan Kemenpan untuk dipenuhi, tidak mengacu pada Pergub yang melarang Area merokok.

Dari hasil pertemuan data yang harus dipenuhi sebagian besar sudah lengkap, hanya menyempurnakan kembali data yang belum lengkap untuk dipenuhi dan disiapkan sebelum batas akhir pengisian.

3.2. Kegiatan Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi mempunyai Sub Kegiatan sebagai berikut :

3.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dengan Indikator keluaran Sub Kegiatan Terdiri dari :

3.2.1.1. Jumlah Dokumen Pelayanan dengan Target 2 Dokumen (SPP dan SOP)

Dokumen Pelayanan (SPP dan SOP) merupakan Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan adalah sebagai panduan pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan terkait prosedur pengajuan dan persyaratan permohonan perizinan dan nonperizinan yang ditujukan bagi para pejabat aparatur DPMPSTP Provinsi Kalimantan Barat, para pelaku usaha serta masyarakat umum lainnya. Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan Rapat penyusunan ini adalah sebagai sarana mendapatkan masukan-masukan penyusunan dokumen pelayanan perizinan dan nonperizinan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Yang pada akhirnya memiliki sasaran terwujudnya penyelenggaraan Pelayanan Perizinan yang sederhana, cepat dan jelas, transparan sesuai SOP yang ditetapkan.

Memiliki alokasi anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp. 37.962.309 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus sembilan rupiah) dan setelah dilakukan Perubahan pada Refocussing Covid-19 menjadi Rp. 28.513.480 (dua puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 28.513.300 (dua puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu tiga ratus rupiah) atau 99,99%.

3.2.1.2. Jumlah Perizinan dan Nonperizinan dengan Target 180 Izin dan non izin

Pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan melalui sistem pelayanan secara elektronik. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi yang dapat diakses melalui <https://www.oss.go.id/>. Jumlah izin dan non izin yang telah terbit sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Izin	= 1.482
Non Izin	= 711
Total	= 2.193 Izin dan Non Izin

3.2.1.3. Jumlah Peserta Bimtek Wilayah I dengan Target 40 Orang

Memiliki alokasi anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp. 73.215.290 (tujuh puluh tiga juta dua ratus lima belas ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) dan setelah dilakukan Perubahan pada Refocussing Covid-19 menjadi Rp. 726.000 (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang telah terealisasi sampai dengan Desember 2021 sebesar Rp. 711.000 (tujuh ratus sebelas ribu rupiah) atau 97,93%.

3.2.2. Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal dengan Indikator keluaran Sub Kegiatan Terdiri dari :

3.2.2.1. Jumlah Laporan Kepuasan Masyarakat PTSP Provinsi dengan Target 4 Dokumen

Proses penyusunan dan penilaian SKM terhadap pelayanan pada unit kerja DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat adalah untuk mendapat suatu pendapat/penilaian masyarakat tentang kualitas pelayanan publik, serta untuk mengetahui tingkat kinerja pelayanan yang telah diberikan oleh unit kerja DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat.

Laporan Kepuasan Masyarakat PTSP Provinsi memiliki alokasi anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp. 78.883.438 (tujuh puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) dan setelah dilakukan Perubahan pada Refocussing Covid-19

menjadi Rp. 59.683.438 (lima puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) yang telah terealisasi sampai dengan Desember 2021 sebesar Rp 59.645.200 (lima puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah) atau 99,94%.

3.2.2.2. Jumlah PTSP Kabupaten/Kota yang dibina Wilayah I dengan Target 8 PTSP

Maksud pelaksanaan kegiatan adalah melakukan pembinaan terhadap PTSP di Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Barat sehingga terwujudnya peningkatan kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kabupaten/Kota dengan Tujuan:

- a. Terkoordinirnya penyelenggaraan PTSP provinsi dan kabupaten/kota di 8 Kabupaten/Kota dalam pengambilan kebijakan terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan guna menyamakan persepsi dan pemahaman terhadap kebijakan nasional/daerah;
- b. Identifikasi dan Inventarisasi berbagai permasalahan dan solusi terutama terhadap aspek kelembagaan dan regulasi (sistem);
- c. Monitoring dan Evaluasi terhadap perkembangan pendelegasian kewenangan dalam penerbitan perizinan/nonperizinan kepada PTSP lingkup Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan PTSP Kabupaten/Kota memiliki alokasi anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp. 71.391.552 (tujuh puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) dan setelah dilakukan Perubahan pada Refocussing Covid-19 menjadi Rp. 40.857.552 (empat puluh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) yang telah terealisasi sampai dengan Desember 2021 sebesar Rp 40.839.000 (empat puluh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) atau 99 %.

3.2.2.3. Jumlah PTSP Kabupaten/Kota yang dibina Wilayah II dengan Target 6 PTSP

Pelaksanaan PTSP Kabupaten/Kota memiliki alokasi anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp. 67.485.700 (enam puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) dan setelah terjadi perubahan refocusing sebesar Rp. 49.442.700 (empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) dan telah direalisasikan

sampai dengan bulan Desember 2021 sebesar Rp. 48.027.800 (empat delapan juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) atau 97,14%.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan terkait Sistem OSS RBA. Rapat dipimpin oleh Kabid KP2NP Wilayah II dan dihadiri oleh pejabat DPMPTSP Prov Kalbar. Dari hasil rapat dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. DPMPTSP diharapkan dapat mengevaluasi OSS RBA dan wajib memberikan hak akses turunan, serta mengkaji beberapa proses izin yang tidak dapat diproses di daerah dan pembaruan OSS RBA terus dilakukan secara rutin untuk mengetahui adanya perubahan terkait proses izin yang berlaku.
2. Melakukan sosialisasi Sistem OSS RBA kepada pihak yang berperan dalam penyelenggaraan perizinan sistem OSS RBA dan menunggu perbaikan penyempurnaan sistem OSS RBA serta menggunakan aplikasi mandiri yang dimiliki ataupun melalui sistem manual.
3. Akan dikoordinasikan dengan BKPM untuk mendapatkan penegasan dari BKPM terkait proses perizinan yang masih belum dilaksanakan melalui OSS RBA dan masih dilaksanakan secara manual. Izin tersebut nantinya akan dimigrasikan setelah OSS RBA dapat dipergunakan secara sempurna.

Pembinaan pada PTSP Kab/Kota melalui Kegiatan perjalanan dinas ke Kab/Kota yang merupakan agenda kegiatan Bidang KP2NP Wilayah II tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, Surat Edaran tentang refocusing anggaran yang menyebabkan dana perjalanan dinas yang belum direalisasikan dianulir untuk memenuhi target refocusing.

3.2.2.4. Jumlah Rekonsiliasi Data dan Informasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I dengan Target 4 Dokumen

Rekonsiliasi Data dan Informasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan merupakan tahapan yang sangat penting dalam pelaksanaan penyelenggaraan perizinan, oleh karena itu pada tahapan ini akan dilakukan validasi dan sinkronisasi atas data perizinan yang dihimpun oleh DPMPTSP Provinsi dan Dinas Teknis yang menerbitkan pertimbangan teknis/rekomendasi serta perizinan dan nonperizinan yang telah diterbitkan oleh Kabupaten/Kota. Kegiatan rekonsiliasi perizinan dan nonperizinan ini dilakukan secara periodik setiap semester sebagai bahan evaluasi di tingkat Provinsi.

Rapat Rekonsiliasi Data ini dimaksudkan untuk memvalidasi dan mensinkronkan data perizinan dan nonperizinan yang dihimpun oleh Provinsi sehingga diperoleh data yang akurat/valid lengkap dan up to date dan sekaligus dapat memberikan gambaran tentang tingkat capaian kinerja pelayanan perizinan di Provinsi Kalimantan Barat pada periode tertentu, baik tingkat capaiannya terhadap target di dalam Rencana Strategis maupun RPJMD.

Rekonsiliasi Data dan Informasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan memiliki alokasi anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp. 89.668.643 (delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) dan setelah dilakukan Perubahan pada Refocussing Covid-19 menjadi Rp. 51.907.643 (lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) dengan realisasi sampai dengan Desember 2021 sebesar Rp. 51.879.700 (lima puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) atau 99,94%.

3.2.2.5. Jumlah Rekonsiliasi Data dan Informasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah II dengan Target 4 Dokumen

Rekonsiliasi Data dan Informasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan memiliki alokasi anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp. 73.405.319 (tujuh puluh tiga juta empat ratus lima ribu tiga ratus sembilan belas rupiah) dan setelah perubahan refofusing mejadi sebesar Rp. 49.568.319 (Empat puluh sembilan juta lima ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus sembilan belas rupiah) dan telah direalisasikan sampai dengan bulan Desember 2021 sebesar Rp. 49.524.200 (empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah) atau 99,91 %.

Pelaksanaan kegiatan terkendala dengan pembatasan kegiatan masyarakat terkait Covid 19 untuk mengadakan Rapat/pertemuan dengan OPD Tehnis yang membidangi perizinan sampai dengan Triwulan III serta adanya Surat Edaran tentang refocusing anggaran, terkait pemotongan belanja makan dan minum rapat/pertemuan.

3.2.3. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan dengan Indikator keluaran Sub Kegiatan antara lain :

3.2.3.1. Jumlah Laporan Fasilitasi dan Penyelesaian Permasalahan Pengaduan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I dengan Target 1 Dokumen.

Memiliki alokasi anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp. 65.762.498 (enam puluh lima juta tujuh ratus enam puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan setelah dilakukan Perubahan pada Refocussing Covid-19 menjadi Rp. 44.852.498 (empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) dengan realisasi sampai dengan Desember 2021 sebesar Rp. 44.840.800 (empat puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah) atau 99,97 %.

3.2.3.2. Jumlah Laporan Fasilitasi dan Penyelesaian Permasalahan Pengaduan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Wilayah II dengan Target 1 Dokumen.

Anggaran yang dialokasikan pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 116.185.895 (seratus enam belas juta seratus delapan puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah), namun setelah terjadi perubahan refofusing menjadi sebesar Rp. 53.651.595 (lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) dan telah direalisasikan sampai dengan untuk kegiatan ini (lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) atau 99,90 %.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada sub kegiatan ini antara lain :

Pada Aplikasi pengaduan di LAPOR!-SP4N ditemukan ada 4 pengaduan di antaranya sebagai berikut :

1. Pengaduan permohonan pencabutan IUPHHK-HTI PT. Kusuma Puspawana di Kab. Melawi, dikarenakan tidak terdaftar pada database DPMPTSP Prov Kalbar, disarankan untuk berkoordinasi dengan DLHK Prov Kalbar sebagai instansi teknis dan pembina.
2. Pengaduan HGU PT. MAR di Kab. Kubu Raya masuk dalam pekarangan rumah dan fasilitas negara, terkait hal tersebut DPMPTSP Prov Kalbar tidak mendapat informasi yang jelas dan lengkap, permasalahan yang disampaikan bukan kewenangan dan tupoksi DPMPTSP Prov Kalbar.
3. Pengaduan Rekomendasi Penelitian/Pendataan di Kab. Sambas an. Setya Aristu Pranoto dikarenakan pelayanan informasi yang tidak sesuai SOP, permohonan perizinan disampaikan pada hari jumat tgl 18 juni 2021, permohonan pertek

disampaikan ke instansi teknis pada hari senin tanggal 21 juni 2021, pertek dari instansi teknis baru diterima pada tanggal 29 juni 2021 dan segera diproses oleh DPMPTSP Prov Kalbar. Dalam memberikan Rekomendasi Penelitian/Pendataan dengan dasar Pertek dari instansi teknis Banlitbang Prov Kalbar sesuai SOP dalam penerbitan Rekomendasi Penelitian/Pendataan.

4. Pengaduan atas nama Heri Mustari pada tanggal 28 Juli 2021 dengan aduan penerima pelayanan (Front Office) permohonan perizinan yang kosong sebelum jam 12.00 Wib. Tanggapan yang disampaikan atas pengduan tersebut yaitu sebagai berikut :

- a. Pada saat itu Pontianak berada pada level 4 (empat) terkait kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berimplikasi terhadap aktifitas perkantoran pemerintah dimana diberlakukan pembahasan WFH 75% dan WFO 25% sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Mendagri 23 Tahun 2021 dan Surat Keputusan Gubernur Kalbar Nomor 711 Tahun 2021;
- b. Hal ini menyebabkan Petugas Pelayanan (Front Office) pada DPMPTSP Prov Kalbar juga diatur secara bergantian sesuai jadwal WFO, disamping it terdapat beberapa personil yang terkonfirmasi positif Covid-19;
- c. DPMPTSP Prov Kalbar akan memaksimalkan kualitas pelayanan dan tetap melaksanakan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan setiap Senin s/d Jumat dengan jadwal jam pelayanan yang telah diumumkan di Pengumuman Kantor dan website resmi dpm_ptsp.kalbarprov.go.id sampai dengan adanya perubahan regulasi.

4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pagu anggaran Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebesar Rp. 718.190.260 dengan realisasi sebesar Rp. 500.409.140 dengan persentase 69,68%. Untuk mencapai sasaran pada Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

4.1. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal, dari rencana belanja sampai dengan Desember 2021 sebesar Rp. 64.776.660, telah terealisasi sebesar Rp. 64.756.660 atau 99,97%. Kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan Desember 2021 antara lain:

- ✓ Menyurati perusahaan penanaman modal PMDN dan PMA mengenai pemberitahuan kewajiban penyampaian LKPM Triwulan IV Tahun 2020

- ✓ Menyurati perusahaan penanaman modal PMDN dan PMA mengenai pemberitahuan kewajiban penyampaian LKPM Triwulan I Tahun 2021
 - ✓ Menyurati perusahaan penanaman modal PMDN dan PMA mengenai pemberitahuan kewajiban penyampaian LKPM Triwulan II Tahun 2021
 - ✓ Menyurati perusahaan penanaman modal PMDN dan PMA mengenai pemberitahuan kewajiban penyampaian LKPM Triwulan III Tahun 2021
 - ✓ Menyurati perusahaan penanaman modal PMDN dan PMA mengenai pemberitahuan kewajiban penyampaian LKPM Triwulan IV Tahun 2021
 - ✓ Terlaksananya rapat persiapan pelaksanaan kegiatan pemantauan, pelaksanaan penanaman modal dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021.
 - ✓ Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 bertempat di Aula DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat dengan jumlah peserta 40 orang yang berasal dari aparat DPMPTSP Kabupaten/Kota.
 - ✓ Melakukan monitoring, pengumpulan dan penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal Triwulan I (Periode Januari – Maret) Tahun 2021;
 - ✓ Melakukan monitoring, pengumpulan dan penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal Triwulan II (Periode April – Juni) Tahun 2021;
 - ✓ Melakukan monitoring, pengumpulan dan penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal Triwulan III (Periode Juli – September) Tahun 2021;
 - ✓ Melakukan pendampingan dan memberikan pelayanan secara mandiri kepada pelaku usaha yang baik yang belum bisa melakukan pengisian LKPM secara Online maupun perbaikan pelaporan LKPM yang telah diberikan oleh BKPM.
- 4.2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal, dari rencana belanja sampai dengan Desember 2021 sebesar Rp. 42.454.900,00-, telah terealisasi sebesar Rp. 42.454.900 atau 100%, Kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan Desember 2021, antara lain :
- ✓ Melaksanakan Kegiatan Fasilitas Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal, sebagai berikut:
 - ✓ Fasilitas penyelesaian pemasalahan dalam hal memediasi dan sinkronisasi lahan izin berusaha pertambangan operasi produksi PT. Labai Persada Tambang dengan PT. Aditya Agroindo di Bidang Perkebunan Kelapa Sawit

dan Industri Minyak Kelapa Sawit yang berlokasi di desa Sekucing Labai, Kuantan Hilir, Balai Pinang dan Botoh Besi Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang. Kegiatan fasilitasi dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 bertempat di Aula DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat dengan jumlah peserta 20 orang yang berasal dari aparaturnya DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat yang terkait dengan pelayanan perizinan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal, Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Barat

- ✓ Melaksanakan kegiatan penunjang Dana Alokasi Khusus Non Fisik untuk penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi/Bimbingan Teknis Kemudahan Perizinan Berusaha (sebanyak 6 kali);
- ✓ Memfasilitasi permasalahan yang sedang dihadapi oleh pelaku usaha dalam merealisasikan usahanya.

4.3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal, dari rencana belanja sampai dengan Desember 2021 sebesar Rp. 41.255.700, telah terealisasi sebesar Rp. 40.931.100 atau 99,21%, Kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan Desember 2021, antara lain : Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan realisasi investasi melalui LKPM yang disampaikan pelaku usaha.

5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Pagu anggaran Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal sebesar Rp. 77.015.100 dengan realisasi sebesar Rp. 77.015.100 dengan persentase 100%. Untuk mencapai sasaran pada Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, dari rencana belanja sampai dengan Desember 2021 sebesar Rp. 77.015.100 terealisasi sebesar Rp. 77.015.100 atau 100%. Kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan Desember TA. 2021, antara lain :

- ✓ Terlaksananya rapat persiapan pelaksanaan program pengelolaan Data dan Sistem Informasi pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 bertempat di Ruang rapat DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat.
- ✓ Terlaksananya rapat Rekonsiliasi Data Realisasi Penanaman Modal pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 bertempat di Aula DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat dengan jumlah peserta sebanyak 35 orang berasal dari Pejabat di

Lingkungan DPMPTSP Kabupaten/Kota dan pengelola data pengendalian pelaksanaan penanaman modal Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat.

- ✓ Membuat press release Realisasi Investasi di Kalimantan Barat Periode Triwulan I (Januari – Maret) Tahun 2021;
- ✓ Membuat press release Realisasi Investasi di Kalimantan Barat Periode Triwulan II (April –Juni) Tahun 2021:
- ✓ Membuat press release Realisasi Investasi di Kalimantan Barat Periode Triwulan III (Juli – September) Tahun 2021:
- ✓ Menyusun buku Data dan Informasi Perkembangan Investasi;
- ✓ Menyusun buku Perkembangan Investasi PMA/PMDN dan Perizinan Berusaha
- ✓ Memfasilitasi dan menyampaikan kebutuhan data dan informasi perizinan berusaha bagi Perangkat Daerah ataupun Instansi terkait lain, diantaranya : Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat, POLDA Kalimantan Barat, KOMNAS HAM Perwakilan Kalimantan Barat dan instansi/perangkat daerah lainnya;
- ✓ Mengadakan pertemuan pemberian hak akses turunan OSS dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko;
- ✓ Memfasilitasi pengusulan hak akses turunan OSS dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat pencapaian kinerja sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 dapat disajikan berdasarkan 2 (dua) sasaran berikut ini:

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Barat

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	Jumlah nilai investasi	29,00 T	20,79 T	19,41 T	20,09 T	20,79 T	21,52 T	20,19 T	17,54 T			
2	Indeks Kepuasan Masyarakat				A	A	A		B			

Upaya untuk merealisasikan pencapaian sasaran tersebut adalah melalui pelaksanaan 5 Program dengan nilai pagu dan realisasi sebagai berikut:

NO	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Nilai Investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	191.610.680	191.489.050	99,94%	87,31%	n/a
		Program Promosi Penanaman Modal	151.688.492	151.633.800	99,96%		
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	718.190.260	500.409.140	69,68%		
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	77.015.100	77.015.100	100%		
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Pelayanan Penanaman Modal	583.403.850	579.160.500	99,27%	87,03%	n/a
RATA-RATA					93,77%	87,17%	n/a

Apabila dibandingkan antara persentase anggaran sebesar 93,77% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 87,17%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya masih belum efisien dikarenakan capaian kinerjanya belum mencapai 100%.

Target kinerja yang tidak tercapai pada realisasi investasi lebih dikarenakan faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Target kinerja belum tercapai sesuai Tapkin sehubungan dengan adanya refocusing anggaran;

- b. Struktur dan fungsi pemberdayaan usaha daerah di kabupaten/kota belum sesuai dengan Perka Nomor 9 Tahun 2017 sehingga koordinasi ke tingkat bawah mengalami kesulitan dan Kebijakan Pusat yang terlalu dinamis mengakibatkan berpengaruh terhadap kebijakan Daerah.
- c. Jumlah Investasi berkurang dikarenakan masih pandemi Covid-19 serta diberlakukannya PPKM masih menjadi tantangan dan faktor yang berpengaruh terhadap kinerja investasi sepanjang tahun 2021 dan disamping itu kondisi beberapa Proyek Strategis Nasional di provinsi Kalimantan Barat yang menjadi penyokong pada kinerja investasi pada tahun 2020, dalam perkembangannya tahun 2021 ini telah hampir menyelesaikan rencana investasinya.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Untuk lebih meningkatkan kinerja DPMPSTP Provinsi Kalbar, isu-isu strategis yang menjadi fokus perhatian pada periode 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan realisasi investasi sebagai bagian dari penciptaan iklim yang kondusif bagi penanaman modal dan kemudahan berusaha.
2. Meningkatkan pelayanan perizinan dan nonperizinan baik secara offline maupun online untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, baik, efisien, efektif dan transparan serta akutabel kepada masyarakat.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a) Penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan yang dilaksanakan melalui sistem OSS RBA hingga saat ini masih belum dapat diaplikasikan secara sempurna.
- b) Perubahan sistem dari OSS Versi 1.1 menjadi OSS RBA saat ini membawa kegalauan bagi penyelenggara pelayanan perizinan dan nonperizinan. Untuk permasalahan sistem OSS RBA, sudah seringkali dikomunikasikan serta didiskusikan kepada Kementerian Investasi/BKPM terutama mengenai sistem yang masih belum mampu mengakomodir perizinan-perizinan berusaha yang sifatnya bukan perizinan induk/utama atau dikenal dengan istilah Untuk Mendukung Kegiatan Usaha. Pelaku usaha berkewajiban mengurus izinnya, namun ketika izinnya masuk ke dalam kategori UMKU, maka hingga saat ini belum dapat dilayani secara sistem OSS RBA sementara untuk diproses melalui sistem OSS Versi 1.1 sudah terkunci dan tidak dapat digunakan.

- c) Terkait hal ini, daerah tidak berani mengambil kebijakan untuk memproses perizinan dimaksud secara manual sebelum mendapatkan penguatan dari Kementerian Investasi/BKPM ataupun melakukan diskresi dengan meminta kajian dari Biro Hukum sehingga dapat dibuatkan kebijakan Kepala Daerah. Kemudian, untuk pelaku usaha yang mengajukan perizinannya atas nama Yayasan, Perusda, Badan Usaha Milik Desa, juga masih belum dapat diakomodir datanya melalui OSS RBA
- d) permasalahan sektor yang sudah terakomodir namun belum dapat diproses perizinannya seperti Pendidikan. Untuk sektor Pendidikan, saat ini masih ditangani secara manual dengan mengacu kepada Surat Edaran Menteri terkait.
- e) Sektor Koperasi yang sudah ada menunya di OSS namun untuk perizinan baru dan perizinan berusaha pembukaan kantor cabang masih belum terakomodir di OSS RBA sehingga tetap dilaksanakan secara manual dan mengacu kepada Surat Edaran Menteri Koperasi dan UMKM RI Nomor : 33 Tahun 2021 tentang Perizinan berusaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi tanggal 11 Oktober 2021.
- f) Terbitnya Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang membawa perubahan pada kelembagaan DPMPTSP dari sisi jabatan eselonering yang berganti menjadi jabatan fungsional tertentu untuk bidang-bidang yang tadinya berada di dalam struktur organisasi DPMPTSP.
- g) Permasalahan lainnya adalah berkaitan dengan Sumber Daya Manusia yang terbatas baik dalam hal jumlah maupun kompetensinya.
- h) Pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS) masih belum terintegrasi dengan sistem SiCantik.
- i) Sejak penerbitan perizinan berusaha melalui OSS RBA, DPMPTSP belum mempunyai sistem Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan secara online.
- j) Pengunjung yang datang ke kantor DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat untuk mengurus Perizinan dan Nonperizinan sebagian besar adalah kuasa bukan pemohon yang bersangkutan.

Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :

- a) Diharapkan Pemerintah Pusat dapat lebih meningkatkan koordinasi dan dukung. Bersama merevisi ataupun mengkaji ulang regulasi/kebijakan yang telah diterbitkan agar dapat disinkronkan dengan OSS RBA sehingga antara sistem dan regulasi sudah dapat berjalan beriringan dan memberikan kemudahan, percepatan, serta kepastian hukum kepada pelaku usaha.

- b) Segera ada kejelasan bagaimana kepastian hukum untuk kelembagaan dan jabatan fungsional di DPMPTSP sehingga pejabat/ASN yang ditugaskan di DPMPTSP dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan profesional dan tenang tanpa harus dikacaukan dengan sistem kepegawaian yang dapat menurunkan semangat bekerja ASN dimaksud.
- c) Percepatan integrasi Pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS) dengan sistem SiCantik.
- d) Formasi pengadaan CPNS/P3K untuk ditempatkan di DPMPTSP, selain itu Pendidikan dan Pelatihan serta Bimtek juga perlu diperbanyak dan peserta yang mengikutinya ditanggung pembiayaan keikutsertaan karena DPMPTSP sangat minim anggarannya, apalagi untuk diklat dan Bimtek. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kesejahteraan atau tunjangan khusus bagi penyelenggara perizinan karena beban dan resiko kerja yang dihadapi juga sangat tinggi. Kemudian, kepada Pemerintah Pusat yang memiliki kewenangan dalam pembinaan karir pegawai negeri diharapkan dapat membuat kebijakan yang mengatur bahwa ASN yang sudah mengikuti Diklat atau Bimtek tidak boleh dimutasi (kecuali promosi) dalam kurun waktu tertentu agar apa yang sudah didapat dan dipelajari pada saat pelatihan/bimtek dapat diimplementasikan sesuai tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka.
- e) Evaluasi Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.
- f) Menyederhanakan prosedur pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKP

Rancangan awal Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 disusun berdasarkan Renstra Tahun 2019-2023 serta membandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 yang berdasarkan pertimbangan atas kinerja pencapaian target Renstra, dan target kinerja yang dicapai dan pagu indikatif yang disediakan. Berikut hasil review terhadap Rancangan Awal RKP Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat :

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Barat

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
2.18.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
2.18.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	23.291.700	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	24.222.700
2.18.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	11.469.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	12.243.200
2.18.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	11.245.400	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	12.018.700

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Barat

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
2.18.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	11.428.500	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	12.201.800
2.18.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	11.288.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	12.061.300
2.18.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	46.138.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	48.258.700
2.18.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	75.487.100	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	75.396.300
2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
2.18.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/ Bulan	7.783.030.983	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/ Bulan	7.783.030.983

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Barat

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
2.18.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	273.600.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	273.600.000
2.18.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	76.618.900	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	76.618.900
2.18.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	27.802.200	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	27.802.200
2.18.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	31.736.800	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	31.736.800
2.18.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
2.18.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	21.459.900	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	21.459.900

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Barat

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
2.18.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
2.18.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	84.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	84.000.000
2.18.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	30.230.100	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	30.230.100
2.18.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	12.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	12.000.000
2.18.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5 Dokumen	79.464.700	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5 Dokumen	79.464.700
2.18.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	40.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	80.000.000
2.18.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	29.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	29.000.000

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Barat

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					Administrasi Umum Perangkat Daerah				
2.18.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	19.914.800	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	19.914.800
2.18.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	41.463.900	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	41.463.900
2.18.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	32.654.900	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	32.654.900
2.18.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.700.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.700.000
2.18.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	68.366.800	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	68.366.800
2.18.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	24.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	24.000.000
2.18.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	24.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	24.000.000

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Barat

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
2.18.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	115.927.200	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	74.762.938
2.18.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	29.551.800	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	29.551.800
2.18.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	45.311.900	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	45.311.900
2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
2.18.01.1.07.05	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	27.930.500	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	27.930.500
2.18.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	85.954.265	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	97.030.500
2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
2.18.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.000.000

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Barat

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
2.18.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	204.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	216.000.000
2.18.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	721.159.200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	622.359.200
2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
2.18.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	78.827.200	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	88.827.200
2.18.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	63.194.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	73.194.000
2.18.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	74.650.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	74.650.000

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Barat

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
2.18.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	70.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	70.000.000
2.18.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10.000.000
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				
2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi					Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				
2.18.02.1.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	410.117.000	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	384.883.000
2.18.02.1.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha Di Daerah	3 Kegiatan Usaha	68.616.300	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha Di Daerah	3 Kegiatan Usaha	52.264.300

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Barat

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi					Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi				
2.18.02.1.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi		Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	1 Dokumen	100.000.000	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi		Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	1 Dokumen	94.092.000
2.18.02.1.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi		Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi	1 Dokumen	96.847.200	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi		Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi	1 Dokumen	96.785.700
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				
2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi					Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				
2.18.03.1.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	4 Dokumen	732.726.900	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	4 Dokumen	696.993.600
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				
2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi					Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Barat

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
2.18.04.1.02.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi	100 Pelaku Usaha	279.288.828	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi	100 Pelaku Usaha	263.300.828
2.18.04.1.02.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi	180 Kegiatan Usaha	236.886.800	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi	180 Kegiatan Usaha	220.898.800
2.18.04.1.02.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Kewenangan Daerah Provinsi	30 Orang	178.114.300	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Kewenangan Daerah Provinsi	30 Orang	111.825.020

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Barat

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
2.18.04.1.02.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Provinsi	10 Kegiatan usaha	200.948.100	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Provinsi	10 Kegiatan usaha	200.948.100
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				
2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi					Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				
2.18.05.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	10 Kegiatan Usaha	97.014.398	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	10 Kegiatan Usaha	85.627.898
2.18.05.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	120 Pelaku Usaha	515.178.800	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	120 Pelaku Usaha	499.783.800

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Barat

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
2.18.05.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	20 Pelaku Usaha	327.607.600	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	20 Pelaku Usaha	327.607.600
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				
2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi					Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi				
2.18.06.1.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 Dokumen	121.937.300	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 Dokumen	111.444.300

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

DPMPTSP Prov. Kalbar telah ikut serta dalam Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Musrenbang Tingkat Provinsi. Setiap masukan dan kritik serta saran yang berkaitan dengan program dan kegiatan pada DPMPTSP Prov. Kalbar akan diakomodir dan ditindaklanjuti dengan seksama.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berikut disampaikan telaahan terhadap kebijakan nasional dalam rangka penanaman modal :

1. Mendorong terciptanya kepastian hukum melalui penyederhanaan dan harmonisasi peraturan terkait penanaman modal (deregulasi peraturan).
2. Memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal melalui OSS RBA.
3. Melaksanakan evaluasi kinerja pelayanan publik khususnya pada pembinaan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan kabupaten/kota sesuai amanat Pasal 532 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 55 Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.
4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota sesuai Permendagri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.
5. Melaksanakan fasilitasi dan pengawasan penanaman modal sebagai upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha, perkembangan realisasi penanaman modal dan/atau pelaksanaan kewajiban kemitraan yang dilaksanakan terhadap kegiatan usaha sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pelimpahan dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
6. Menyusun bahan promosi penanaman modal yang memuat informasi proyek penanaman modal yang siap ditawarkan dan/atau potensi penanaman modal, dan testimoni pelaku usaha.

3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah meningkatnya laju nilai investasi.

Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalbar dalam mewujudkan tujuan tersebut adalah meningkatnya nilai investasi melalui perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi, serta kebijakan, penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Jumlah Nilai Investasi	13,18 T	18,75 T	19,41 T	20,09 T	20,79 T	21,52 T	100,56 T
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	A	n/a	n/a	A	A	A	A

3.3. Program dan Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi, sedangkan Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program, dan Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.

Rencana Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023 dalam penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal sebanyak 6 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Program Pengelolaan. Dari 6 program tersebut di atas terdiri dari 14 kegiatan dan 52 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(2)	9
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
2.18.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
2.18.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	24.222.700	DAU		
2.18.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	12.243.200	DAU		
2.18.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	12.018.700	DAU		
2.18.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	12.201.800	DAU		
2.18.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	12.061.300	DAU		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(2)	9
2.18.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3 Laporan	48.258.700	DAU		
2.18.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2 Laporan	75.396.300	DAU		
2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
2.18.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		53 Orang/ Bulan	7.783.030.983	DAU		
2.18.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Dokumen	273.600.000	DAU		
2.18.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	76.618.900	DAU		
2.18.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		1 Dokumen	27.802.200	DAU		
2.18.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Dokumen	31.736.800	DAU		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(2)	9
2.18.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada perangkat Daerah							
2.18.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	21.459.900	DAU		
2.18.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
2.18.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		2 Paket	84.000.000	DAU		
2.18.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		1 Dokumen	30.230.100	DAU		
2.18.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		1 Dokumen	12.000.000	DAU		
2.18.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		5 Dokumen	79.464.700	DAU		
2.18.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		20 Orang	80.000.000	DAU		
2.18.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		20 Orang	29.000.000	DAU		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(2)	9
2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							
2.18.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	19.914.800	DAU		
2.18.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	41.463.900	DAU		
2.18.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket	32.654.900	DAU		
2.18.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	17.700.000	DAU		
2.18.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	68.366.800	DAU		
2.18.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		5 Dokumen	24.000.000	DAU		
2.18.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1 Laporan	24.000.000	DAU		
2.18.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan	74.762.938	DAU		
2.18.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1 Dokumen	29.551.800	DAU		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(2)	9
2.18.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1 Dokumen	45.311.900	DAU		
2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
2.18.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		2 Paket	27.930.500	DAU		
2.18.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		30 Unit	97.030.500	DAU		
2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
2.18.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	4.000.000	DAU		
2.18.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan	216.000.000	DAU		
2.18.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan	622.359.200	DAU		
2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(2)	9
2.18.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		1 Unit	88.827.200	DAU		
2.18.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		3 Unit	73.194.000	DAU		
2.18.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		80 Unit	74.650.000	DAU		
2.18.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3 Unit	70.000.000	DAU		
2.18.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		10 Unit	10.000.000	DAU		
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL							
2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(2)	9
2.18.02.1.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		1 Dokumen	384.883.000	DAU		
2.18.02.1.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha Di Daerah		3 Kegiatan Usaha	52.264.300	DAU		
2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi							
2.18.02.1.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi		1 Dokumen	94.092.000	DAU		
2.18.02.1.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi		1 Dokumen	96.785.700	DAU		
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL							
2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi							
2.18.03.1.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi		4 Dokumen	696.993.600	DAU/DAK		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(2)	9
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL							
2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi							
2.18.04.1.02.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi		100 Pelaku Usaha	263.300.828	DAU		
2.18.04.1.02.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi		180 Kegiatan Usaha	220.898.800	DAU		
2.18.04.1.02.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Kewenangan Daerah Provinsi		30 Orang	111.825.020	DAU		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(2)	9
2.18.04.1.02.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Provinsi		10 Kegiatan Usaha	200.948.100	DAU		
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL							
2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi							
2.18.05.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal		10 Kegiatan Usaha	85.627.898	DAU		
2.18.05.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		120 Pelaku Usaha	499.783.800	DAU/DAK		
2.18.05.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan		20 Pelaku Usaha	327.607.600	DAU/DAK		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(2)	9
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL							
2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi							
2.18.06.1.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan		4 Dokumen	111.444.300	DAU		

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam tatanan implementasinya dijalankan melalui kegiatan-kegiatan terintegrasi yang dapat diuraikan dalam program dan kegiatan yang bersumber dari dana APBD Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Sasaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi perkantoran, aparatur, mencukupi sarana dan prasarana iandor dalam mendukung pelaksanaan oprasional kantor sehingga bermanfaat dalam mendukung pelaksanaan kinerja aparatur memenuhi keperluan aparatur dalam membantu newujudkan aparatur yang berdisiplin tinggi, meningkatkan kemampuan dan kompetensi aparatur sehingga menjadi aparatur yang profesional dan memiliki wawasan luas, meningkatkan peran dan kinerja DPMPTSP Provinsi Kalbar daam menghadirkan laporan keuangan dan kinerja tepat waktu dan meningkatkan kebutuhan barang dan jasa di DPMPTSP Provinsi Kalbar. Adapun Kegiatan dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yaitu:

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Dari kegiatan tersebut dapat dijabarkan lagi menjadi beberapa Sub kegiatan antara lain :

- 1) Penyusunan DokumenPerencanaan Daerah
- 2) Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA – SKPD
- 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD
- 5) Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA – SKPD
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD
- 7) Evaluasi Kinerja perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dari kegiatan tersebut dapat dijabarkan lagi menjadi beberapa Sub kegiatan, antara lain :

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 4) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - 5) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah
- Dari kegiatan tersebut dapat dihabarkan lagi menjadi beberapa Sub Kegiatan, antara lain :
- 1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Dari Kegiatan tersebut dapat di jabarkan lagi menjadi beberapa Sub Kegiatan, antara lain :
- 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - 4) Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - 5) Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 6) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Dari kegiatan tersebut dapat dijabarkan lagi menjadi beberapa Sub Kegiatan, antara lain :
- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4) Persediaan Bahan Logistik Kantor
 - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 7) Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 9) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - 10) Dukungan Pelaksanaan Sistem Permerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Dari kegiatan tersebut dapat dijabarkan lagi menjadi beberapa Sub Kegiatan, antara lain :
 - 1) Pengadaan Mebel
 - 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Dari kegiatan tersebut dapat dijabarkan lagi menjadi beberapa Sub Kegiatan, antara lain :
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan barang Milik Daerah penunjang Urusan pemerintahan Daerah
Dari kegiatan tersebut dapat dijabarkan lagi menjadi beberapa Sub Kegiatan, antara lain :
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Sasaran Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal adalah meningkatnya realisasi investasi melalui data potensi investasasi dan iklim penanaman modal. Adapun kegiatan dari Program ini adalah :

1. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
Dari Kegiatan tersebut dapat dijabarkan lagi menjadi beberapa Sub kegiatan, antara lain :
 - 1) Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasiiltas/insentif dan kemudahan Penanaman Modal

2) Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi

Dari Kegiatan tersebut dapat dijabarkan lagi menjadi beberapa Sub Bagian, antara lain :

- 1) Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi
- 2) Penyediaan data Peta Potensi dan peluang Usaha Provinsi

3. Promosi Penanaman Modal

Sasaran Program Promosi Penanaman Modal adalah meningkatnya realisasi investasi promosi penanaman modal. Adapun kegiatan dari program ini adalah :

1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah provinsi

Dari kegiatan tersebut dapat dijabarkan lagi menjadi beberapa Sub bagian, antara lain :

- 1) Pelaksanaan Kegiatan Promosi penanaman Modal Kewenangan Provinsi

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

Sasaran Program Pelayanan Penanaman Modal adalah meningkatnya Jumlah Izin dan Non izin yang di terbitkan mutu penyelenggaraan pelayanan perizinan. Adapun kegiatan dari program ini yaitu :

1. Penanaman Modal yang menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan menjadi Kewenangan Provinsi Daerah

Dari kegiatan tersebut dapat dijabarkan lagi menjadi beberapa Sub Kegiatan, antara lain :

- 1) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasikan secara Elektronik
- 2) Pemantauan dan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non perizinan Penanaman Modal
- 3) Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan non Perizinan.
- 4) Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

5. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

Sasaran dari Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal adalah. Adapaun kegiatan dari program ini adalah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Adapun kegiatan dari program ini yaitu :

1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

Dari kegiatan tersebut dapat dijabarkan menjadi beberapa Sub Bagian, antara lain :

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
- 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
- 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

6. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Sasaran dari Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal adalah Terwujudnya Pengelolaan Data dan Sistem Penanaman Modal. Adapun Kegiatan dari program ini adalah :

1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi

Dari kegiatan tersebut dapat dijabarkan lagi menjadi beberapa Sub Kegiatan, antara lain :

- 1) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Barat

No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran 2023
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	24.222.700
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	12.243.200
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	12.018.700
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	12.201.800
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	12.061.300
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	48.258.700
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	75.396.300
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/ Bulan	7.783.030.983
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	273.600.000

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Barat

No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran 2023
1	2	3	4	5	6
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	76.618.900
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	27.802.200
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	31.736.800
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	21.459.900
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	84.000.000
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	30.230.100
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	12.000.000
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5 Dokumen	79.464.700
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	80.000.000
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	29.000.000
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	19.914.800

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Barat

No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran 2023
1	2	3	4	5	6
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	41.463.900
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	32.654.900
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.700.000
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	68.366.800
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	24.000.000
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	24.000.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	74.762.938
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	29.551.800
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	45.311.900
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	27.930.500
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	97.030.500
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.000.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	216.000.000

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Barat

No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran 2023
1	2	3	4	5	6
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	622.359.200
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	88.827.200
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	73.194.000
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	74.650.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	70.000.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10.000.000
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				
2.1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	410.117.000
		Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha Di Daerah	3 Kegiatan Usaha	68.616.300

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Barat

No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran 2023
1	2	3	4	5	6
2.2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	1 Dokumen	100.000.000
		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi	1 Dokumen	96.847.200
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				
3.1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	4 Dokumen	696.993.600
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				
4.2	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi	100 Pelaku Usaha	263.300.828
		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi	180 Kegiatan Usaha	220.898.800
		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Kewenangan Daerah Provinsi	30 Orang	111.825.020

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Barat

No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran 2023
1	2	3	4	5	6
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Provinsi	10 Kegiatan usaha	200.948.100
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				
5.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	10 Kegiatan Usaha	85.627.898
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	120 Pelaku Usaha	499.783.800
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	20 Pelaku Usaha	327.607.600
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				
6.1	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 Dokumen	111.444.300

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Barat diharapkan dapat menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat. Rencana kerja ini masih memuat banyak data yang masih memerlukan pemutakhiran baik dari program maupun kegiatan beserta pagu indikatifnya. Pencapaian program dan kegiatan melalui rencana kerja diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai apa yang telah dilaksanakan serta gambaran mengenai program dan kegiatan yang akan datang serta besaran dukungan yang diperlukan.

Demikian Rencana Kerja DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 disusun dengan mengintegrasikan berbagai potensi sumber daya yang dimiliki, diharapkan dengan dukungan dari para pemangku kepentingan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan, mampu menciptakan kelancaran dalam penyelenggaraan urusan tersebut di atas di Provinsi Kalimantan Barat. Dalam hal apabila terjadi perubahan kebijakan ataupun regulasi yang harus segera dilaksanakan dan Renja ini dianggap tidak lagi sesuai maka akan dilakukan peninjauan kembali dan perubahan sebagaimana mestinya.

Pontianak, 26 Juli 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Barat,



Hendra, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19680925 198908 1 001